

ISLAM DAN SOSIAL POLITIK DEKADE 1990 –AN (Sebuah Wacana Politik Islam Pasca Orde Baru)

Oleh : Ainur Ropik, M.Si *)

Abstrack :

Political Islam from the beginning independence of Indonesia, 1950 's (old order) until the mid- 1983 era New Order have a situation that according to Islam is very harmful , because Muslims feel marginalized in addition to the majority of Indonesia's population is Muslim Islamic politics it can not grow because of the emphasis that is made by new order all Islamic political movements and activities are supervised and in the limit . After doing some of the terms in the proposed new order government to Islamist parties at the time that the fusion of Islamic political parties Political Islam at the end of late New Order era began to rise and begin accommodated . With accommodation of political Islam into the governance of the New Order era many beneficial changes to the entry of Political Islam Islamic leaders into the government bureaucracy in both the legislative , judicial and other reforms to transform the era of the New Order era and replace . This paper will try to outline the state of the back of political Islam in the era of the New Order and post-New Order political Islam .

Keywords : *Islam Politik, Termarginalisasi, Terakomodasi.*

Pendahuluan.

Hubungan antara Islam dan Negara merupakan satu persoalan yang rumit di Indonesia, sejak awal kemerdekaan perdebatan mengenai Islam dan Negara telah banyak mewarnai perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sebagian muslim Indonesia berkeinginan kuat untuk menjadikan Islam sebagai agama dan idiologi Negara.

Situasi semacam ini otomatis menciptakan citra tertentu tentang Islam di mata pemerintah yang tidak sependapat dengan kecenderungan mereka, baik sukarno (orde lama) maupun soeharto (orde baru) sedikit banyak menganggap Islam, khususnya Islam Politik, sebagai kekuatan yang dapat mengancam keberlangsungan Negara Indonesia yang pluralistik. Pada waktu itu pemerintah memang sengaja memecah kekuatan politik Islam dengan cara *divide* dan modernis. Maka terpecahlah kekuatan masumi yang dulu merupakan gabungan antara NU dan *et empire (Islamic policy colonial)*. Dengan menghidupkan dikotomi antara Islam tradisional Muhammadiyah. Maka ketika Soeharto memegang kekuasaan, ia melancarkan kebijakan yang membatasi kebijakan Islam Politik, Soeharto memberlakukan idiologi Negara pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kehidupan politik dan Negara.

Dan tak terbantahkan sejak 1966-1984 terdapat marginalisasi umat Islam. Apa saja dikerjakan Islamobia untuk memojokkan Islam, melalui

rekayasasosial politik misalnya; peraturan pemerintah pada 1982 tentang larangan jilbab di sekolah; pembatasan dakwah, dan melalui politik keamanan (komodo jihad/DI/TII/NII, peristiwa Tanjung Priok 1984.(Kuntowijoyo, 1998, hal.187). yang jelas pada masa ini hubungan antara Islam dan Negara dalam orde baru menempatkan pola yang hegemonik. Dan dalam hubungan itu, Negara secara idioplitis mendominasi masyarakat dan social politik lainnya.

Posisi hegemonik Negara atas masyarakat dan ditujukan dengan kemampuan mengembangkan system politik yang dapat mengontrol masyarakat sipil, antara lain melalui serangkaian kebijakan politik yang menagarah pada marginalisasi peran politik masa; birokrasi di perkuat, stabilitas dijaga, konflik dieliminasi, dan politik masa diambangkan. Upaya kooptasi yang sistematis ini berhasil menjinakkan kekuatan-kekuatan politik yang radikal sekalipun. Namun sebelumnya sekitar tahun 1979-1984, pola hubungan Islam dan Negara baru memasuki tahap "resiprokal kritis". Pada masa ini ada langkah-langkah untuk saling memahami disertai dengan timbal balik untuk mengerti posisi dan potensi masing-masing. Dan barulah pada tahun 1985 hubungan antara Islam dan Negara dapat dikatakan akomodatif.

Namun kemudian secara mengejutkan reformasi berlangsung – pak soeharto lengser, dan orde baru berubah menjadi sesuatu yang di hujat di sana sini. Orde baru tidak hanya identik dengan status quo, tetapi juga dengan segala tindak kebusukan, yang kemudian umum didefinisikan sebagai KKN (orde Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), era reformasitelah memberikan warna baru bagi Indonesia setelah 32 tahun berada dibawah hegemoni orde baru. Ruang-ruang berekspresi melalui partai yang sebelumnya tertutup telah terbuka kembali. Pembicaraan mengenai partai baru, yang dulu seolah-olah haram, telah menemukan kebebasannya. Lorong politik memang penting dan tidak boleh dinafikan. Islam tanpa kekuatan politik tidak akan mampu berbuat banyak dalam mencoraki dimensi horizontal perilaku masyarakat.

Dan kini umat Islam telah memanfaatkan keterbukaan tersebut, dengan bangkitnya kembali "Islam Formal". Dengan bangkitnya kembali Islam Formal apakah ini merupakan kemajuan atau kemunduran umat Islam ? hal ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

Islam Politik Era Orde Baru; Penjinakan Idealisme dan Aktifisme Politik Islam.

Meski Islam politik mengalami sejumlah set back, aspirasinya tidak pernah lenyap. Bahkan ia menjadi potensi dormant yang siap muncul sewaktu-waktu jika keadaan memungkinkan. Hal inilah yang persis kita saksikan setelah runtuhnya kekuasaan Soeharto (orde baru) berikut gagalnya kudeta G 30 S/PKI pada tahun 1965. Bersamaan dengan bangkitnya orde baru, aspirasi Islam politik kenbali muncul; terdapat keinginan kalangan Islam menghidupkan kembali masyumi yang dilarang Soekarno. Sebagai alasan soekarno membubarkan partai masyumi karena para pemimpin partai ini banyak terlibat dalam pemberaontakan PRRI.

Tertapi aspirasi itu tidak mendapatkan tempat pada kekuasaan Soeharto. Karena pada masa orde baru memiliki kebijakan yang keras seperti yang didukung oleh militer pada masa itu, dukungan tersebut berbentuk militer mengambil tindakan tegas terhadap siapa saja, yang ingin menimpang dari pancasila dan UUD 1945 seperti yang telah dilakukan melalui

pemberontakan partai komunis di Madiun, Ngestapu, Dar al-Islam/Tentara Islam Indonesia (sebuah gerakan Islam fanatic yang paling kuat pada 1950-an dan memperoleh dukungan di Jawa Barat yang berupaya mendirikan Negara Islam) dan Masyumi serta Partai Sosialis Indonesia.

Bahkan pada awal 1967, Suharto sendiri menegaskan bahwa militer tidak akan menyetujui rehabilitasi kembali partai Masyumi. Dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Beberapa kalangan berpendapat bahwa kemungkinan Masyumi untuk direhabilitasi kembali sama selaki sudah tertutup. Namun kemudian, dengan berbagai syarat dan pembatasan dari pemerintah partai Masyumi akhirnya bisa direhabilitasi kembali dengan nama Partai Muslim Indonesia (Pasmusi, pada 20 Februari 1968), dengan pimpinan Djarnawi Adi Kusumo dan Lukman Harun, keduanya aktifis Muhammadiyah. Dengan berbagai syarat yang dijalani partai Masyumi seperti yang diajukan pemerintah masa itu supaya para pemimpin Masyumi bersedia mendefinisikan kembali agenda politik mereka dalam kerangka-kerangka yang lebih dapat diterima oleh pemerintah. Oleh karena itu partai Masyumi direhabilitasi menjadi Partai Muslim Indonesia (Parmusi), dengan pembatasan; para pemimpin Masyumi yang senior tidak menduduki posisi pemimpin didalamnya. Daris inilah partai Masyumi berubah menjadi Partai Muslim Indonesia.

Dengan direhabilitasinya partai Masyumi ke Parmusi, jelas kekuatan politik Islam sangat berkurang, apalagi pemerintah melakukan tekanan dan control yang ketat terhadap partai Islam. Hal ini terlihat pada pemilu tahun 1971, dimana ada upaya pemerintah untuk membantu Golkar menang dalam pemilu. Persiapan dan strategi yang efektif membuat Golkar menang dalam pemilu dan mengalahkan partai-partai lain termasuk Parmusi (Masyumi Baru) yang baru didirikan. Dalam pemilu tersebut Golkar mendapatkan suara 62,67% karena relative tidak terkena intervensi luar, sedangkan partai-partai Islam, seperti NU 18,67% syarannya sedikit lebih banyak dari perolehan suara mereka dalam pemilihan umum pada 1955 (18,4%). Namun Parmusi yang dipandang sebagai penerus Masyumi benar-benar terpuruk hanya mengantongi 5,36% suara jauh dibandingkan pada pemilu 1955 yakni 20,9% suara. Dan partai-partai Islam lainnya seperti PSII memperoleh 2,39% dan Perti 1,3 %.

Kemenangan orde baru, karena berhasil mengeliminir gerakan politik umat Islam dengan melarang tokoh politik umat Islam masa orde lama tampil kembali memimpin partai, orde baru merangkul ABRI sebagai mitra kerjanya. Orde Baru masih trauma dengan kekuatan politik Islam sebagaimana yang terjadi dalam sejarah orde lama, 20 tahun pasca kemerdekaan. Pilihan orde baru terhadap ABRI sebagai mitra kerja juga didasarkan atas pertimbangan netralitas ideologi, disamping itu Suharto dibesarkan di ABRI dan mempunyai pengaruh yang cukup kuat.

Kerjasama antara ABRI dan Soeharto membawa bencana yang cukup signifikan bagi umat Islam, staf pribadi yang diangkat oleh Soeharto adalah ABRI. Diantara staf pribadi Soeharto yang paling berpengaruh adalah Ali Murtopo. Kebijakan-kebijakan pada masa itu sangat dipengaruhi oleh para pembantunya, khususnya Ali Murtopo. Kepercayaan Soeharto terhadap Ali Murtopo disebabkan keberhasilannya dalam meletakkan Opsus (Operasi Khusus). Sehingga pada pemilu yang diadakan pertama semenjak Orde Baru

Golkar menang dan partai Islam seperti NU dan Parmusi (masyumi) mendapat suara di bawah Golkar.

Regenerasi sekber Golkar yang dilakukan oleh Orde Baru semakin menunjukkan kekuatannya; pengaruh ABRI, dan pengaruh Intelektual serta politisi memiliki latar belakang Jawa Abangan, katolik dan sosialis, mereka sangat dekat dengan Ali Murtopo. Kelompok ini memiliki CSIS yang menjadi kebijakan-kebijakan orde baru. Anggota ini selalu di isi oleh orang-orang yang selalu memiliki pandangan picik terhadap umat Islam, dan dapat di prediksi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sangat merugikan kelompok Islam misalnya tidak ada hari libur di hari-hari besar Islam dan bulan Puasa, *depolitisasi* partai dengan jalan *fusi* partai, memberi keleluasaan terhadap perjudian yang dulu sering dikenal dengan SDSB, pembatasan Dakwah dan peristiwa tanjung periuk.

Fusi partai yang dilakukan oleh Orde Baru, yakni dengan mendesak 9 partai politik yang menjadi peserta pemilu 1971, untuk menjadi 3 organisasi kekuatan partai. Masing-masing partai yakni; Partai persatuan Pembangunan (PPP) fusi dari 4 (empat) partai Islam; Partai Demokrasi Indonesia (PDI) fusi dari 4 partai nasionalis, Kristen/katolik dan yang terakhir Golkar itu sendiri. Tapi dari fusi yang dilakukan pemerintah, partai Islam (PPP) yang mewakili empat partai Islam malah terjadi segmentasi, kompetisi, dan konflik internal pada politik Islam.

Kebijakan-kebijakan tersebut sangat merugikan umat Islam, apalagi program "*depolitisasi*" Islam dan gerakan Islamobia, membuat Islam cenderung "berada di luar" dari pada ikut berada di dalam. Dan bahkan secara politik selalu dicurigai dan sering diposisikan sebagai Skape Goat (kambing hitam), atau sebagai "kucing kurap", meminjam istilah Natsir. Hal ini tidak lain karena trauma orde baru pada kekuatan politik Islam pada masa lalu (masa-masa awal kemerdekaan), seperti DI/TII, Karto Suwiryo di Jawa Barat (1948 – 1962), karna pada masa itu karto suwiryo mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII), dia juga telah menduduki kota Yogyakarta, menyandra Soekarno dan bung Hatta sampai kepada kontak senjata yang memakan korban jiwa baik di TNI dan masyarakat sipil waktu itu, dan tidak hanya itu di luar pulau jawa di Sulawesi selatan (kahar Muzakar), Daut Breureuh (Aceh) dan peristiwa tanjung periuk yang menolak asas tunggal Pancasila (1984). Maka lengkaplah kecurigaan pemerintah Orde Baru pada Islam Politik di era itu yang ternyata Islam Politik di era Soeharto masih terwarnai oleh corak legalistic dan formalistic (1966-1984), walaupun tidak se radikal pada masa Orla. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya Marginalisasi politik Islam pada Masa Orde Baru.

Evaluasi Sikap; Suatu Strategi Baru Politik Islam.

Setelah Ormas dan lembaga Islam menerima dan mencantumkan pancasila sebagai satu-satunya asas kedalam anggaran dasar organisasi, maka menghilanglah persepsi negative orde baru terhadap Islam. Sejak itu hubungan Islam dan Negara semakin harmonis, dengan bukti terakomodasinya kelompok Islam pasca pemilu 1987 menduduki DPR dan MPR. Disamping itu adanya keretakan hubungan soeharto dengan kelompok militer (internal militer sendiri).

Terakomodasinya kelompok Islam pasca pemilu 1987, dalam birokrasi disebabkan mencainya ketegangan antara orde baru dengan kelompok Islam. Hal ini terlepas dari usaha yang dilakukan oleh kaum modernis (intelektual muslim) yang menjembatani antara Islam dan Negara, sehingga member harapan bagi penyelesaian masalah ketidak harmonisan hubungan antara Islam dan Negara. Kiprah intelektual tersebut diperoleh oleh generasi baru pemikir dan aktivis Islam. Format baru tersebut menitik beratkan pada substansi, bukan pada bentuk. Oleh karena itu, kalangan intelektual muslim Indonesia berupaya membangun kesadaran pemikiran politik umat Islam untuk tidak memaksakan kehendak dan system simbol keislamannya kedalam wacana politik bangsa yang sangat plural.

Adapun gerakan pembaharuan tersebut oleh Bahtiar dikategorikan dalam tiga wilayah penting yakni: **Pertama**, Pembaharuan keagamaan/theologi yang memfokuskan diri pada pencarian dasar-dasar teknologi yang memungkinkan terciptanya sintesis yang memungkinkan antara Islam dan Negara, terutama dilihat dari hubungan politiknya. Tokoh-tokoh yang menjadi pembaharu dalam gerakan ini yakni: Nurcholis Madjid, Djohan Efendi, Ahmad Wahid, Harun Nasution, Abdurrahman Wahid, Munawir Sazali. **Kedua**, Pembaharuan politik/birokrasi yang bertujuan untuk menjembatani hubungan antara Islam dan Pemerintah sehingga kecurigaan politik dan ideologis bisa dikikis paling tidak dikurangi. Mereka yang bergerak dalam bidang ini yakni: Sulastomo, Akbar Tanjung, Mintoredjo, Mar'ie Muhammad, dan Sa'adilah Mursyid. **Ketiga**, Aliran transformasi social, ekonomi dan politik kemasyarakatan. Perhatian kelompok ini adalah melakukan pemberdayaan social, ekonomi dan politik masyarakat kalangan bawah baik yang ada di pedesaan maupun perkotaan. Mereka yang bergerak dalam bidang ini yakni: Sudjoko Prasodjo, M.Dawam Raharjo, Tawang Alun, Utomo Danandjaja dan Adi Sasono.

Secara koordinasi, ketiga aliran tersebut telah berhasil merubah/menggeser wacana perpolitikan Islam di Indonesia dari "Islam Politik" ke "Islam Kultural", bisa dikatakan sebagai kemenangan Islam Kultural. Islam politik adalah Islam yang berusaha mewujudkan dan mengaktualisasikan dalam kekuasaan atau kelembagaan politik resmi, khususnya pada bidang eksekutif dan legislative. Sedangkan Islam Kultural adalah Islam yang mewujudkan dirinya secara substansi dalam lembaga-lembaga kebudayaan dan peradaban lainnya. Pendeknya Islam minus politik atau bisa juga dikatakan dengan Islam dakwah, Islam Pendidikan, Islam seni, Islam Ibadah dan lain sebagainya. Dan bahkan beberapa terobosan dari tokoh Islam diatas telah memberikan sinyal bagi pemerintah Soeharto, yang pada dasarnya mereka (umat Islam) bersedia mengambil sikap lebih moderat dan mau untuk diajak kerja sama seraya berharap agar semakin dilibatkan dalam *sharing power* dan mengambil kebijaksanaan. Tawaran aliansi pemimpin Islam tersebut direspon oleh Soeharto melalui akomodasi yang semakin Luas.

Dari sejak itulah kita melihat semakin banyaknya para pelaku politik Islam yang bergabung ke Golkar, ke Birokrasi, dan agensi-agensi pemerintah lainnya. Misalnya diantara mereka adalah Sularso, Bustanul Arifin, Madjid Ibrahim, Abdul Ghafur, Akbar Tanjung, Azwar Anas, Hasrul Harahap, Mar'i Muhammad, tarmizi Taher dan banyak lagi yang lainnya. Semua perkembangan ini memperkuat posisi struktur Islam birokrat. Sejak itu isu

demi isu yang dipandang setidaknya oleh sebagian ulama-menguntungkan Islam melalui bergulir secara formal kita dapat mencatat adanya Undang-Undang Pendidikan Nasional (UUPN-1989), Undang-undang Peradilan agama (UUPA-1991), di ubahnya kebijakan tentang larangan berjilbab (1991), dikeluarkannya keputusan bersama tingkat menteri berkenaan dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan shodaqoh (BAZIZ) tahun 1991, dihapusnya SDSB – 1993. Dan Dari yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila (YPMP) pada tahun 1991 dengan membangun 449 Masjid, pengiriman seribu orang da’l (mubaligh Muslim) ke daerah-daerah transmigrasi dan pendirian ICMI – 1990.

Itu semua menimbulkan penilaian adanya reverse treat mant (perlakuan baik) dari pemernah kepada umat Islam, dari sifat anagnostik ke akomodatif. Dalam perspektif lain menimbulkan penilaian mengenai Islam sebagai kekuatan legitimasi kepada Orde Baru. Hubungan keduanya berkembang ke arah yang lebih resiprokat (timbang balik).

Dari uraian diatas Nampak jelas bahwa, perpolitikan Islam sejak 1985 sampai runtuhnya Orde Baru sangat jauh berbeda jika di dibandingkan dengan Islam Politik pada tahun 1966 – 1984 yang nampak adalah Islam Politik yang masih terwarnai oleh corak legalistik dan formalistik (walaupun tidak sekeras pada awal kemerdekaan tahun 1950-an), hingga pada masa ini posisi Islam sangat tidak menguntungkan; selalu dicurigai dan terpinggirkan. Namun kemudian sejak tahun 1985 sampai akhir Orde Baru yang berkembang adalah “Islam Kultural” yang loyal dan lunak pada pemerintah yang membawa sampai pada terakomodasinya cita-cita Islam lewat wakil-wakil Islam yang duduk di birokrasi.

Uraian diatas merupakan kilas balik diskursus Politik Islam era Orde Baru sebagai titik pemberangkatan awal untuk memahami wacana politik pasca Orde Baru. Dalam konteks ini muncul permasalahan mendasar ketika keadaan intelektualisme Islam baru, yang kultur (tidak memperhatikan sisi simbolisme keislaman, mengapa pada era Reformasi muncul kembali partai-partai yang mengatasnamakan partai Islam sebagai Simbol Politik ? apakah hal ini merupakan suatu kemajuan atau justru kemunduran ?

Politik Islam Pasca Orde Baru

Gelombang Reformasi politik memang telah melahirkan kegairahan masyarakat untuk mengartikulasikan kepentingan politiknya yang tidak tersalurkan dalam Orde Baru. Dalam konteks umat Islam, ekspresi kebebasan politik yang baru dinikmati itu adalah antusiasme dalam mendirikan partai politik Islam, baik yang secara langsung dan formal barazaskan Islam maupun yang memperjuangkan nilai-nilai Islam secara subtansial. Ada beberapa partai Islam yang masih mengedepankan formal atau simbol keagamaan dan bahkan membawa sasas Islam, seperti; Partai Persatuan pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK), yang sekarang berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera), Partai Masyumi barudan partai masyumi. Ada juga partai yang secara tidak langsung mengatasnamakan partai Islam, seperti; Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), PUMI dan SUNNI.

Inilah yang menjadi pembenaran sementara orang untuk mengatakan “repolitisasi Islam” dalam artian maraknya kehidupan politik “Islam Formal” atau dipandang sebagai kebangkitan “Islam Politik” yang pada masa awal

Soeharto tidak diberi peluang untuk hidup dan akan lebih arif bila bangkitnya partai-partai Islam saat ini dianggap sebagai upaya menebus kesalahan masa lalu daripada ekspresi “dendam” terhadap rezim penguasa yang memarginalisasi politik Islam.

Bangkitnya umat Islam Dewasa ini terkesan mengalami daur ulang (political recycling) kalau bukan malah repetisi atau replika dari masa lalu. (Abu Zahro:1999, h.128), hal ini terlihat pada pemilu 1999 ternyata masih ada yang menggunakan simbol-simbol Islam. Namun yang jelas simbol-simbol dan aliran yang ada pada politik Islam sekarang tidak sekental masa lalu, karena Islam politik yang sekarang lebih terbuka, ini terlihat mereka bisa menerima orang lain yang jelas tidak satu aqidah untuk bergabung dengan partai mereka.

Jelasnya munculnya partai Islam baik yang berazaskan Islam maupun yang tidak. Tidak lain adalah untuk mencapai dukungan publik yang secara mayoritas beragama Islam, dan tanpa target untuk mendirikan Negara Islam. Ini sangat jauh dengan “Islam Formal” pada decade 1950-an yang secara nyata menggunakan symbol-simbol Islam dan sekaligus menginginkan berdirinya Negara Islam. Sedangkan perpolitikan Islam pada pasca Orde Baru tak hanya mengedepankan formal (symbol-simbol islam) tetapi juga subtansialisme (yakni perpaduan antara formalitas dan subtansialis). Hal ini dapat dilihat dari gerak politik Islam yang sedang dimainkan oleh para aktivis politik Islam pasca Orde Baru ini tampaknya sedang mengarah pada suatu eksperimen yang mengambil posisi tengah sebagai sintesa antara simbolisme dan subtansionalisme politik Islam. Secara praktis, langkah politik kalangan poros tengah dapat dijadikan sebagai bukti eksperimen sintesis tersebut, wacana poros tengah ini tidak lain adalah penggalan potensi dan aspirasi berbagai kelompok Islam yang selama ini bercerai berai dalam beraneka sekat pemikiran dan organisasi.

Keberanian pengambilan sintesis seperti ini tidak akan terungkap kalau kecurigaan terhadap kelompok Islam masih belum tuntas karena dasar inilah barangkali keberhasilan umat Islam dalam melakukan obyektifitas terhadap nilai-nilai Islam. Maka jelaslah bahwa Islam politik pasca Orde baru walaupun dengan menggunakan simbol-simbol Islam bukan berarti kembali pada politik Islam pada dekade 1950-an yang memaknai Islam secara leterlek yang kemudian akan mereka wujudkan dengan gabungan Negara Islam. Akan tetapi politik Islam pasca Orde Baru walau masih masih ada yang menggunakan symbol-simbol Islam, itu tidak lain hanya sebagai perwujudan diri sebagai partai Islam yang memegang mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam, yang tujuannya adalah untuk mencari dukungan dari umat Islam yang mayoritas tersebut, dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan yakni di pemilu 1999 partai Islam kalah dengan partai-partai lain akan tetapi itu sudah menjadi permasalahan yang lain.

kekalahan partai Islam pada pemilu tahun 1999 dikarenakan; **Pertama;** masyarakat kita belum memiliki pemahaman yang mendorong mereka untuk memilih partai Islam. Artinya masyarakat kita belum memiliki kesadaran yang tinggi. Hal ini sangat wajar terjadi karena secara sistemik umat mengalami proses sekulerisasi. **Kedua;** Pemaknaan sekularisasi yang salah, sehingga umat Islam tanpa sikap kritis menerima konsep-konsep kapitalisme, liberalism dan globalisasi. Adopsi pemikiran-pemikiran kapitalisme ini pada gilirannya menjauhkan umat Islam dari aqidah dan

hukum Islam. Ummat akhirnya tidak melihat tawaran-tawaran ideologis yang ditawarkan parpol Islam sebagai hal penting bagi mereka. Dari kedua faktor tersebut malah membuat seolah-olah “alergi” terhadap konsep-konsep ideologis Islam dan bahkan banyak kita melihat orang Islam sendiri yang alergi. Dan bahkan intelektual Islam dan Ulama yang menolak partai yang berdasarkan Islam, malah mereka menuduh asas Islam sebagai suatu yang tak pantas, menakutkan, fundamentalis, mengotak-ngotakkan dan tuduhan-tuduhan keji lain. Bahkan orang Islam yang alergi dengan hukum Islam menganggapnya keji, ketinggalan zaman, dan wajar kalau kemudian bagi sebagian umat Islam malah menakutkan buat mereka.

Namun perlu diingat bahwa kekalahan itu sebenarnya bukan kekalahan Islam, akan tetapi kekalahan partai-partai yang membawa simbol dan bendera yang sempit. Memang kalau kita melihat dari individu partai, semua partai Islam kalah bahkan setelah diadakan penggabungan (*Stembus Accord*) partai-partai Islam tetap kalah. Namun demikian orang Islam tidak hanya dipartai –partai Islam saja akan tetapi juga ada di Golkar, PDI, PNI dan seterusnya, dan inilah kemenangan Islam yang sebenarnya. Karena mereka yang ada dalam partai itu memiliki pengaruh pada partai itu sendiri.

Kesimpulan

Islam Era Orde baru (1966-1984), selalu cenderung berada di luar dari pada didalam, dan bahkan secara politik selalu dicurigai dan sering diposisikan sebagai *skape goat* (kambing hitam) atau sebagai “kucing kurap”, hal ini tidak lain karena trauma Orde baru pada kekuatan politik Islam pada masa lalu (masa-masa awal kemerdekaan).

Namun kemudian pada tahun 1985 sampai akhir masa Orde Baru hubungan antara Islam dan Negara dapat dikatakan akomodatif, ini karena mencairnya ketegangan antara orde baru dengan kelompok Islam. Hal ini tidak terlepas dari gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh intelektual muslim (bidang keagamaan, theology, politik/birokrasi, dan transformasi sosial-ekonomi) diaman ketiga aliran ini telah mampu menggeser/merubah wacana perpolitikan Indonesia dari Islam Politik ke Islam Kultural.

Pergeseran/perubahan wacana politik dari Islam Politik ke Islam Kultural, menghilangkan mitos yang terbangun selama ± 20 tahun. Sejak itu hubungan antara Islam dan Negara semakin harmonis dengan bukti terakomodasinya kelompok Islam pasca pemilu 1997 menduduki DPR dan MPR. Belum habis “bulan madu” dikalangan Islam Politik dengan Negara Orde baru yang berlangsung sejak awal 1990-an, tiba-tiba situasi politik berubah, dasar-dasar orde baru runtuh. Dengan itu apa yang disebut dengan hegemoni politik juga mulai mencair. Akibat-akibat yang muncul ke permukaan itu adalah reaksi baik dalam kontak kepercayaan. Ada belasan partai Islam, dan bahkan masih ada yang menggunakan simbol-simbol Islam yang nampaknya pengulangan (replika) dari sejarah pada masa lampau (1950-an). Namun yang jelas partai-partai Islam pada pemilu 1999 tidak hanya mengedepankan simbol, akan tetapi juga isi (substansi), dan hal ini terbukti dengan *Stembus accord*. Posisi semacam ini tidak akan terungkap kalau kecurigaan terhadap kelompok Islam masih belum tuntas, inilah barangkali keberhasilan umat Islam dalam melakukan objektivitas nilai-nilai Islam.

Referensi.

- Ali, Fachry, *Golongan Agama Elit Kekuasaan*, Surabaya: Risalah Gusti. 1996.
- Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 1996.
- Azra, Azumardi. *IslamPolitik dan Islam Kultural ; Pasca Soeharto” dala Indonesia Tradisi Menuju Demokrasi* (ed), Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999
- Bolan, BJ. *The Stunggle of Islam in Modern Indonesia*, The Hague:Martinus Nijhof. 1971.
- Bresnan, John. *Managing Indonesia: The Modern Political economy*. New York: Colombia University Press, 1998.
- D. Jackson, Karl. *Traditional Authority Islam and Rebellion: A Study of Indonesia Politicl Behavior*, Berkeley: University of California Press. 1980.
- Effendy, Bachtiar, *Re-politisasi Islam: Pernahkan Islam Berhenti Berpolitik ?* Bandung: Mizan. 2000.
- , *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina. 1998.
- , *Islam and the State Indonessia; Munawir Sazali and Development of new Theological Underpining of Politic Islam*, Dalam *Studi Islamika* Volume 2 November 1999.
- Fatah, Eep Saefullah, *Manajemen Konflik Politik dan Demokrasi Orde Baru*, Ulumul Qur'an, No. 56, Vol. V 1994.
- Fauzi, Nasrullah ali, *ICMI Antara Status Quo dan Demokratis*, Bandung: Mizan 1995.
- Farid Wadjdi, Mengevaluasi Parpol Islam Pasca Pemilu, Dalam Hamid Basyaib, *Mengapa Partai Islam Kalah ? Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu 1999 sampai Pemilihan Presiden*, Jakarta : Alvabet, 1999
- Kuntowijoyo, “Strategi Baru Umat Islam” dalam *Indonesia di Simpang Jalan* (ed Bandung : Mizan, 1998.
- Ma'arif, Syafi'i. *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Radi, Umadi, *Strategi PPP 1973 – 1982: Suatu Studi Tentang Politik Islam Tingkat Nasional*, Jakarta: Integrita Press, 1998.

Samson, Allan, "Indonesia Islam Since The New Order", Dalam Ahmad Ibrahim (ed), *Reading on Islam Southeast Asia*, Singapura: Institut of Southeast Asia Studies, 1985.

Samsudin, Din, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: Logos, 21.

Surya, Yahya, "Politik Islam Pasca Orde Baru" dalam *Jurnal Komunikasi dan Informasi Keagamaan*, vol. 1 No.1 April 2000.

Thoha, Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Zahra, Abu, *Politik Demi Tuhan Nasionalisme Religious di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.